



RENJA 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jln. Cut Nyak Dien No... Telp. (0761) 33073, 848593, 21172, 28997 Fax. (0761) 21172, 22513
PEKANBARU – RIAU

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

**NOMOR :Kpts. 543 /BKD/1.1/VI/2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2018**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu menetapkan Pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000-2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau; dan
15. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018;
- KEDUA : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juni 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904199703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah tahun 2018.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Pekanbaru, 12 Juni 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
I.1. Latar Belakang.....	I-1
I.2. Landasan Hukum.....	I-2
I.3. Maksud dan Tujuan	I-4
I.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	II-1
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Orgainsasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah	II-1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Orgainsasi Perangkat Daerah	II-8
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Orgainsasi Perangkat Daerah	II-9
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal	II-15
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-22
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	III-1
III.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Orgainsasi Perangkat Daerah 2018	III-6
III.3. Program dan Kegiatan	III-8
BAB IV. PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 Provinsi Riau	II-2
Tabel 2.3.	Review Rancangan Awal RKPD 2017	II-16
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	III-9



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017 menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014–2019 yaitu **“Terwujudnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang Profesional, Akuntabel dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2025”**.

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai pusat membangun Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan pada prinsip, nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan mutu Aparatur Sipil Negara dengan penyelenggaraan Sistem Manajemen Aparatur Sipil negara yang berdasarkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) agar terwujudnya pelayanan kepegawaian yang prima melalui Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel dan sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang baik profesional dan handal.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2018.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2018, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2018; dan
21. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2018 ;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD ditahun selanjutnya.

Adapun tujuan dari Renja OPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah;

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di tahun 2018;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun 2018.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Renja OPD Tahun Anggaran 2018, mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SKPD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian targetRenstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2017 pada tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2017 Provinsi Riau.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2017 Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017		
					Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Keamsan Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		13.111.256.159			96,68			156,92	
1.20.1.20.10.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	5 tahun	2 tahun	91.172.000	1 tahun	1 tahun	84	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	5 tahun	2 tahun	1.261.522.530	1 tahun	1 tahun	95	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	5 tahun	2 tahun	714.123.610	1 tahun	1 tahun	96	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	5 tahun	2 tahun	1.880.088.250	1 tahun	1 tahun	98	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	5 tahun	2 tahun	346.632.000	1 tahun	1 tahun	96	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan Dan Penggandaan	5 tahun	2 tahun	385.427.000	1 tahun	1 tahun	94	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Banqunan Kantor	5 tahun	2 tahun	203.108.600	1 tahun	1 tahun	99	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln	2 tahun	2 tahun	4.212.325.400				18 unit	20	1.000
1.20.1.20.10.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5 tahun	2 tahun	315.970.500	1 tahun	1 tahun	99	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	5 tahun	2 tahun	341.222.500	1 tahun	1 tahun	99	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5 tahun	2 tahun	1.434.813.569	1 tahun	1 tahun	99	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor BKP2D	5 tahun	2 tahun	1.379.368.000	1 tahun	1 tahun	99	1 tahun	4	80
1.20.1.20.10.01.116.	Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)	Jumlah Pameran Pembangunan (Riau Expo) yang diikuti	5 pameran	2 pameran	392.680.200	1 pameran	1 pameran	99	1 pameran	4	80
1.20.1.20.10.01.124.	Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	Jumlah dokumen Rapat Koordinasi BKP2D Se-Provinsi Riau	5 dokumen	2 dokumen	152.802.000	1 dokumen	1 dokumen	99	1 dokumen	4	80
	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja (%)		5.473.719.410			119,06			151,40	
1.20.1.20.10.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	163 unit	-	-	163 unit	163 unit	97	-	163	163
1.20.1.20.10.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	107 unit	47 unit	968.952.500				-	47	44
1.20.1.20.10.02.021.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	1.033 unit	424 unit	633.750.000				-	424	41
1.20.1.20.10.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	2 unit	2 unit	630.659.023	2 unit	2 unit	99	2 unit	2	100
1.20.1.20.10.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor	15 unit	7 unit	85.167.200	15 unit	15 unit	89	93 unit	15	100
1.20.1.20.10.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	388 unit	90 unit	365.188.900	160 unit	103 unit	92	160 unit	353	91
1.20.1.20.10.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	3 unit	1 unit	2.790.001.787	2 unit	1 unit	99		2	67
	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		2.264.545.426			87,93			73,47	
1.20.1.20.10.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	840 orang	313 orang	181.191.500				120 stel	433	52
1.20.1.20.10.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	721 orang	145 orang	83.834.500	168 orang	168 orang	96		313	43
1.20.1.20.10.03.006.	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan fisik dan mental	840 orang	336 orang	305.566.200	168 orang	168 orang	100	120 orang	624	74
1.20.1.20.10.03.012.	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah pegawai yang diambil sumpah lainnya	905 orang	-	57.216.600	200 orang	200 orang	99	200 orang	400	44
1.20.1.20.10.03.013.	Pemantauan disiplin PNS	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin PNS	5.935 orang	2.374 orang	481.748.300	1.187 orang	1.187 orang	99	1.187 orang	4.748	80
1.20.1.20.10.03.014.	Penanganan Kasus-kasus kepegawaian	Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian	103 orang	25 kasus	360.932.276	20 orang	10 orang	99	60 orang	95	92
1.20.1.20.10.03.016.	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah Konseling Psikologi Permasalahan ASN	600 orang		18.582.000	150 orang	150 orang	99	150 orang	300	50
1.20.1.20.10.03.17.	Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau	100 orang	50 orang	125.803.000					50	50
1.20.1.20.10.03.18.	Sosialisasi PERKALAN No. 10, 11, 12 dan 13 tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV pola Baru	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi PERKALAN No. 10, 11, 12 dan 13 tahun 2013 tentang Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV pola Baru	100 orang	100 orang	182.649.050					100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017	
						Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.10.03.018.	Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	Jumlah orang yang mengikuti Training Motivasi Aparatur Sipil Negara	400 orang	80 orang	197.242.000	100 orang	80 orang	99		160	40
1.20.1.20.10.30.52.	Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan olahraga PNS Pemerintah Provinsi Riau	66 orang	22 orang	269.780.000					22	33
1.20.1.20.10.03.019.	Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang melaporkan (LHKPAN)	3.561 orang		-	1.187 orang	-	99	80 orang	80	2
	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 80 jam pelajaran pertahun		1.041 orang	3.773.296.193	823 orang	629 orang	82,27			52,12
1.20.1.20.10.05.025.	Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara	334 orang	33 orang	384.752.900	34 orang	24 orang	95	18 orang	75	22
1.20.1.20.10.05.026.	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	188 orang	22 orang	271.351.580	22 orang	13 orang	92	25 orang	60	32
1.20.1.20.10.05.027.	Diklat TOT Widyaiswara	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat TOT Widyaiswara	120 orang	-	31.921.300	15 orang		-		-	-
1.20.1.20.10.05.028.	Diklat Training of Fasilitator (TOF)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Training of Fasilitator (TOF)	30 orang	-	19.729.600			-		-	-
1.20.1.20.10.05.029.	Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun Kepegawaian Bagi PNS Provinsi Riau	40 orang	40 orang	114.055.100					40	100
1.20.1.20.10.05.029.	Diklat Training Officer Course (TOC)	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Training Officer Course (TOC)	90 orang	30 orang	155.522.786	30 orang	30 orang	92		60	67
1.20.1.20.10.05.030.	Diklat Management of Training (MOT)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Management Of Training (MOT)	90 orang	30 orang	150.135.777	30 orang	30 orang	97		60	67
1.20.1.20.10.05.031.	Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perkawinan dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	85 orang	85 orang	184.786.200			-		85	100
1.20.1.20.10.05.032.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	128 orang	31 orang	294.635.250	22 orang	22 orang	94	15 orang	68	53
1.20.1.20.10.05.033.	Diklat analisis kebutuhan diklat	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	300 orang	90 orang	253.442.750	60 orang	30 orang	88		120	40
1.20.1.20.10.05.034.	Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Analisa Jabatan Dan Beban Kerja	260 orang	70 orang	282.866.050	40 orang	30 orang	100		100	38
1.20.1.20.10.05.035.	Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara Daerah	270 orang	90 orang	138.057.100	60 orang	60 orang	100		150	56
1.20.1.20.10.05.036.	Diklat Teknis Administrasi Kearsipan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	270 orang	60 orang	159.125.000	60 orang	30 orang	74		90	33
1.20.1.20.10.05.037.	Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas	150 orang	60 orang	127.670.250	30 orang	30 orang	95		90	60
1.20.1.20.10.05.038.	Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	150 orang	60 orang	135.592.500	30 orang	30 orang	91		90	60
1.20.1.20.10.05.039.	Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	150 orang	30 orang	53.776.500	30 orang	30 orang	100		60	40
1.20.1.20.10.05.040.	Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Perumusan Standar Kompetensi	120 orang	30 orang	77.236.000	30 orang	30 orang	93		60	50
1.20.1.20.10.05.041.	Diklat penata usahaan keuangan daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Bendahara Keuangan Daerah	120 orang	30 orang	81.134.300	30 orang	30 orang	100		60	50
1.20.1.20.10.05.042.	Diklat bendahara keuangan daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	120 orang	30 orang	97.142.000	30 orang	30 orang	91		60	50
1.20.1.20.10.05.043.	Diklat pengelolaan aset daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	240 orang	60 orang	106.400.700	60 orang	60 orang	100		120	50
1.20.1.20.10.05.044.	Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Pelayanan Publik Yang Prima Dan Berwawasan Good Governance	240 orang	30 orang	130.607.000	60 orang	30 orang	94		60	25
1.20.1.20.10.05.045.	Diklat Pengembangan e-government	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	120 orang	30 orang	113.662.000	30 orang	30 orang	86		60	50
1.20.1.20.10.05.046.	Diklat perencanaan tingkat dasar	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	120 orang	30 orang	137.727.600	30 orang	30 orang	95		60	50
1.20.1.20.10.05.047.	Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	120 orang	30 orang	123.230.900	30 orang	30 orang	100		60	50
1.20.1.20.10.05.048.	Diklat bahasa inggris (TOEFL)	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	260 orang	20 orang	77.680.800	60 orang		98		20	8
	Diklat Teknis Komputer	Terlaksananya Diklat Teknis Komputer	20 orang	20 orang	71.054.250			-		20	100
1.20.1.20.10.05.049.	Diklat pengembangan potensi akademik	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pengembangan Potensi Akademik	120 orang	-	-			-		-	-
	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas, persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan			1.006.467.511			77,64			80,00
1.20.1.20.10.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokum en	2 dokumen	150.006.650	1 dokumen	1 dokum en	100	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.002.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 dokum en	2 dokumen	104.026.860	1 dokumen	1 dokum en	100	1 dokumen	4	80
1.20.1.20.10.06.003.	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi	5 dokum en	2 dokumen	100.192.740	1 dokumen	1 dokum en	100	1 dokumen	4	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017	
				10=(5+7+9)	11=(10/4)	Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1.20.1.20.10.06.004.	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokum	2 dokumen	104.036.540	1 dokumen	1 dokum	99	1 dokumen	4	80	
1.20.1.20.10.06.005.	Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD	Tersusunnya Rencana Startegis	1 dokum	1 dokumen	113.434.565	-	-	-	1 dokumen	1	100	
1.20.1.20.10.06.005.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA)	5 dokum	2 dokumen	198.243.725	1 dokumen	1 dokum	100	1 dokumen	4	80	
1.20.1.20.10.06.009.	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi	15 dokum en	6 dokumen	137.742.731	3 dokumen	3 dokum en	100	3 dokumen	12	80	
1.20.1.20.10.06.028.	Pelaporan barang milik daerah	Jumlah Pelaporan Barang Milik Daerah	5 dokum	1 dokumen	98.783.700	1 dokumen	1 dokum	100	-	2	40	
1.20.1.20.10.06.045.	Penyusunan Revisi Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD	Jumlah dokumen Revisi Rencana Strategis	1 dokum	1 dokumen	-	-	-	-	-	1	100	
	PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun			7.027.875.132			79,89			47,64	
1.20.1.20.10.28.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah orang yang mendapatkan Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara	142 orang	57 orang	3.601.713.832	29 orang	29 orang	97	40 orang	126	89	
1.20.1.20.10.28.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM I)	5 orang	1 orang	37.602.250	-	-	-	2 orang	3	60	
1.20.1.20.10.28.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM II)	59 orang	14 orang	386.228.550	8 orang	8 orang	85	16 orang	38	64	
1.20.1.20.10.28.011.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	Jumlah pejabat eselon III yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM III)	310 orang	30	667.062.800	40 orang	30 orang	92	-	60	19	
1.20.1.20.10.28.012.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	Jumlah pejabat eselon IV yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM IV)	330 orang	85 orang	1.087.495.900	60 orang	45 orang	98	-	130	39	
1.20.1.20.10.28.013.	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Jumlah orang Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4)	400 orang	100	128.624.800	100 orang	100 orang	87	100 orang	300	75	
1.20.1.20.10.28.014.	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	310 orang	40 orang	581.573.300	- orang	- orang	100	-	40	13	
1.20.1.20.10.28.015.	Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	375 orang	80 orang	537.573.700	- orang	- orang	-	-	80	21	
1.20.1.20.10.28.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah bantuan pendidikan ikatan kedinasan				17 orang	17 orang	81	-	17	#DIV/0!	
	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun			1.420.889.240			13,60			18,25	
1.20.1.20.10.29.031.	Diklat Luar Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Luar	66 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.032.	Diklat Membangun Program Inovatif	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.033.	Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.034.	Diklat Implementasi Knowledge Management	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Implementasi Knowledge Management	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.035.	Diklat Membangun Kemitraan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.036.	Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Daerah	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.037.	Diklat Kepemimpinan Global	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.038.	Diklat Entrepreneurial Government	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.039.	Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.040.	Diklat Tenaga Pengelola Teknis	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.041.	Diklat Creative Problem Solving	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.042.	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	90 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.043.	Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Riau	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Jumlah pegawai yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau				-	-	-	143 orang	143	-	
1.20.1.20.10.29.044.	Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Teknis KeWidyaiswaraan Berjenjang	270 orang	-	-	13 orang	-	-	9 orang	9	3	
1.20.1.20.10.29.045.	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencanaan Aparatur	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencanaan Aparatur	80 orang	20 orang	925.472.340	20 orang	20 orang	98	20 orang	60	75	
1.20.1.20.10.29.046.	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mengikuti Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian	80 orang	-	14.990.000	20 orang	20 orang	77	-	20	25	
1.20.1.20.10.29.047.	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti	125 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.048.	Orasi Ilmiah Widyaiswara	Jumlah Widyaiswara yang mengikuti Orasi Ilmiah Widyaiswara	33 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.10.29.049.	Seleksi Asesor Provinsi Riau	Jumlah Asesor Provinsi Riau	60 orang	-	-	15 orang	15 orang	-	50 orang	65	108	
1.20.1.20.10.29.050.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah Kapasitas Asesor Provinsi Riau	60 orang	62 orang	480.426.900	15 orang	15 orang	97	15 orang	92	153	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017	
					Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan untuk peringatan HUT KORPRI	4 kegiatan					2 kegiatan		
	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan fungsi			13.881.930.266			58,94		194,71
1.20.1.20.10.30.005.	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Modul Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	53 unit	-	-	2 aplikasi	2 aplikasi	-	2	4
1.20.1.20.10.30.006.	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah pegawai yang mendapatkan Penghargaan PNS Berprestasi	180 orang	72 orang	1.737.767.300	36 orang		100	18 orang	90
1.20.1.20.10.30.030.	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah SKPD yang mengikuti Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa beban kerja	65 SKPD	-	-	20 SKPD	20 SKPD	-	25 SKPD	45
1.20.1.20.10.30.031.	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Pegawai yang menerima Satya	1.569 orang	838 orang	213.241.900	350 orang	350 orang	80	500 orang	1.688
1.20.1.20.10.30.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetatum dan taspem PNS se Provinsi Riau	Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi Tapetatum Dan Taspem PNS Se Provinsi Riau	5 dokumen	2 dokumen	262.109.000	1 dokumen	1 dokumen	97	1 dokumen	4
1.20.1.20.10.30.036.	Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Orang yang telah mengikuti Bimtek Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	290 orang	70	155.178.100			-	70	24
1.20.1.20.10.30.037.	Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	Jumlah Orang/asn yang mengikuti Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Provinsi Riau	370 orang	120	229.479.900			-	120	32
1.20.1.20.10.30.038.	Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi	330 orang	75	219.370.850	90 orang	90 orang	93	165	50
1.20.1.20.10.30.039.	Bimbingan teknis Manajemen Konstruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Konstruksi Bagi Aparatur Pemerintah	230 orang	50	157.438.000			-	50	22
1.20.1.20.10.30.040.	Bimtek Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011		100 orang	98	139.316.000				98	98
1.20.1.20.10.30.041.	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Provinsi Riau	Jumlah Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bagi PNS Provinsi	280 orang	100	163.090.600	60 orang	60 orang	100	160	57
1.20.1.20.10.30.042.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010		140 orang	70	139.766.100				70	50
1.20.1.20.10.30.043.	Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi	380 orang	200	239.896.000	60 orang	60 orang	97	260	68
1.20.1.20.10.30.044.	Workshop Kegiatan bagi PPTK	Jumlah Pegawai yang mengikuti Workshop	255 orang	75	130.060.700	60 orang	60 orang	100	135	53
1.20.1.20.10.30.047.	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKD	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKP2D	192 orang	160 orang	801.933.330	30 orang	30 orang	99	12 orang	202
1.20.1.20.10.30.048.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKP2D	375 orang	-	-	60 orang	60 orang	-	60	16
1.20.1.20.10.30.049.	Assessment Center Provinsi Riau	Jumlah Assessment Center Provinsi Riau	3.316 orang	199 orang	1.625.952.500	orang	1.339 orang	74	1.538	46
1.20.1.20.10.30.050.	Peningkatan sumber daya aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dengan Emotional Spiritual Quotient	380 orang	200 orang	382.077.900	60 orang	60 orang	100	260	68
1.20.1.20.10.30.057.	Monitoring IPDN	Jumlah Dokumen Monitoring IPDN	5 dokum	2 dokumen	265.730.100	1	1	99	1 dokumen	4
1.20.1.20.10.30.058.	Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara	4 dokum en	1	125.085.900	1 dokumen		100	1	25
1.20.1.20.10.30.060.	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	4 dokum en	1	184.525.700			-	1 dokumen	2
1.20.1.20.10.30.066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Jumlah Dokumen Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	5 dokum en	2 dokumen	355.221.900	1 dokumen		97	1 dokumen	3
1.20.1.20.10.30.067.	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	5 dokum en	2 dokumen	282.370.700	1 dokumen		100	1 dokumen	3
1.20.1.20.10.30.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jangka Waktu Pengadaan Aparatur Sipil	5 tahun	2 tahun	1.162.460.500	168 orang		96	250 orang	252
1.20.1.20.10.30.069.	Seleksi Penerimaan IPDN	Jumlah Penerimaan IPDN	188 orang	23 tahun	344.766.900	22 orang	22 orang	100	45	24
1.20.1.20.10.30.070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Orang/asn yang mengikuti Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	1.115 orang	201 tahun	449.066.500	280 orang		100	200 orang	401
1.20.1.20.10.30.071.	Rakor Widya Iswara	Jumlah dokumen Rakor Widyaiswara	5	2 dokumen	323.533.550	1 dokumen	1 dokum	95	3	60
1.20.1.20.10.30.073.	Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	5	1	-	1 dokumen	1 dokum	-	1 dokumen	3
1.20.1.20.10.30.074.	Pengadaan E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah Aplikasi E Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	18 aplikasi	4	2.759.520.761	2 aplikasi	2 aplikasi	97	6	33
1.20.1.20.10.30.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah waktu Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik	3 tahun	2 tahun	249.570.150	1 tahun		99	1 tahun	3
	Pengembangan Sistem Informasi Management Kepegawaian	Jumlah tahun yang dilaksanakan	5 tahun	1 tahun	198.255.100				1	20
1.20.1.20.10.30.089.	Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau	4 dokum en	1	200.562.400	1 dokumen	1 dokum en	99	1 dokumen	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017	
						Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.10.30.105.	Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	85 orang	25 orang	116.633.300	60 orang	60 orang	-		85	100
1.20.1.20.10.30.106.	Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Karir PNS Provinsi Riau	200 orang	-	-	30 orang	30 orang	-		30	15
1.20.1.20.10.30.107.	Bimbingan Teknis Perka BKN No 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Perka BKN No. 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas	130 orang	-	-	30 orang	30 orang	-		30	23
1.20.1.20.10.30.108.	Penyusunan dan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen Karier Aparatur Sipil Negara	3 dokumen	-	-			-		-	-
	Perlombaan dalam Rangka HUT KORPRI	Jenis cabang olahraga yang diperlombakan dalam Rangka HUT KORPRI	16 cabang						8 cabang		
1.20.1.20.10.30.109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi program dan kegiatan	5 dokumen	2 dokumen	267.948.625	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4	80
	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah Modul aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	3 aplikasi						2 aplikasi		
	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah pejabat Provinsi Riau yang mengikuti seleksi jabatan tinggi	140 orang						70 orang		
	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti Pemetaan Jabatan Administrasi	870 orang						870 orang		
	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial yang disusun	2 dokumen						1 dokumen		
	Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi	Jumlah Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi	2 aplikasi						1 Aplikasi		
	Penyusunan Materi/Alat Test	Jumlah materi/alat test yang tersusun	20 materi						10 Materi		
	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	2 dokumen						1 dokumen		
1.20.1.20.10.30.110.	Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-		1	33
1.20.1.20.10.30.111.	Pengadaan Modul Pembelajaran	Jumlah dokumen Modul Pembelajaran	3	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-		1	33
1.20.1.20.10.30.123.	Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau	Jumlah dokumen penilaian Akreditasi UPT. Diklat Pegawai BKP2D Provinsi Riau	3	-	-	2 dokumen	2 dokumen	-			
1.20.1.20.10.30.125.	Penyusunan Profil BKP2D Se-Propinsi Riau	Jumlah dokumen Profil BKP2D Se-Propinsi Riau	1			1 dokumen					
1.20.1.20.10.51.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara			5.366.175.209			78,66			115,39
1.20.1.20.10.51.001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah Administrasi Pindah Tugas PNS	6.000 orang	1.120 orang	222.409.000	1.100 orang	1.100 orang	100	2400 orang	4.620	77
	Pengelolaan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah dokumen	366 orang	30 orang	80.698.500					30	8
1.20.1.20.10.51.003.	Monitoring, evaluasi dan orientasi pelaksanaan administrasi pengangkatan pejabat struktural eselon II	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	295.519.000					1	50
1.20.1.20.10.51.004.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan struktural di lingkungan Pemda Provinsi Riau	Jumlah orang yang melakukan pengurusan administrasi	900 orang	900	233.504.529					900	100
	Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan	Jumlah tahun Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan	1 tahun	1 tahun	91.661.700					1	100
1.20.1.20.10.51.006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	#### orang	5.345 orang	798.656.200	2.345 orang	2.345 orang	98	4000 orang	11.690	76
1.20.1.20.10.51.007.	Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Provinsi Riau	Jumlah Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dibawah binaan BKP2D	130 orang	12	125.505.700	25 orang	25 orang	98		37	28
1.20.1.20.10.51.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu	#### orang	150	359.231.030	1.000 orang	1.000 orang	100	2000 orang	3.150	23
	Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional widaiswara Provinsi Riau	Jumlah widaiswara yang ditetapkan angka kredit	10 orang	10 orang	123.912.800					10	100
	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di lingkungan pemda Provinsi Riau	Jumlah tahun Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan struktural / fungsional di lingkungan pemda Provinsi Riau	1 tahun	1 tahun	131.154.800					1	100
1.20.1.20.10.51.010.	Pengelolaan administrasi izin belajar	Jumlah Kegiatan Administrasi Izin Belajar	114 orang	110	48.136.100	110 orang	110 orang	99	150 orang	370	325
1.20.1.20.10.51.011.	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian	8.480 orang	1.705 orang	185.675.100	905 orang	905 orang	100	300 orang	2.910	34
1.20.1.20.10.51.012.	Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik	7.912 kpe	209 kpe	307.300.650	150 kpe	150 kpe	100	500 kpe	859	11
1.20.1.20.10.51.013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah kegiatan Formasi PNS Provinsi Riau	840 orang	2 orang	536.427.600	1 dokumen	1 dokumen	93	1 dokumen	4	0
1.20.1.20.10.51.016.	Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau	60 bulan	24 bulan	326.446.000	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	80
1.20.1.20.10.51.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	3.285 orang	-	-	2.000 orang	2.000 orang	-	1189 orang	3.189	97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2017	
						Target Renja OPD Tahun 2016	Realisasi Renja OPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.10.51.018.	Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	1.392 orang	1.392 orang	473.241.100					1.392	100
1.20.1.20.10.51.019.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Terdata	7.912 orang	4.391 orang	433.729.100	2.809 orang	2.809 orang	95	3.000 orang	10.200	129
1.20.1.20.10.51.020.	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	3.285 orang	-	-	2.000 orang	2.000 orang	-	1.285 orang	3.285	100
1.20.1.20.10.51.021.	Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	Jumlah berita Website BKP2D Provinsi Riau	350 berita	140 berita	178.074.400	70 berita	70 berita	97	70 berita	280	80
1.20.1.20.10.51.022.	Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	514 SOP	428 SOP	296.006.800		SOP	100	150 SOP	578	112
	Pengelolaan administrasi penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah fungsional tertentu yang telah ditetapkan angka kreditnya	200 orang						100 orang		
	Rapat-rapat tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Rapat	60 orang	60 orang	118.885.100					60	100
1.20.1.20.10.51.022.	Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKP2D Provinsi Riau	Jumlah aplikasi sistem penatausahaan BKP2D Provinsi Riau				1 aplikasi	1 aplikasi				
1.20.1.20.10.52.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur				533.709.396			71,89			38,06
1.20.1.20.10.52.001.	Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti	Jumlah pegawai yang mengikuti Orientasi Pegawai Negeri Sipil Purna Bakti	1.560 orang	-	36.661.600	300 orang	300 orang	95		300	19
1.20.1.20.10.52.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS	395 orang	155 orang	199.381.200	80 orang	80 orang	93	80 orang	315	80
1.20.1.20.10.52.03.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	1 dokumen	-	19.620.000					-	-
1.20.1.20.10.52.005.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah Pengelolaan Pensiun PNS	2.141 orang	422 orang	278.046.596	318 orang	318 orang	100	400 orang	1.140	53
1.20.1.20.10.52.006.	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah pegawai yang mengikuti Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	7.912 orang		-					-	-
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				-			-			-
3.00.03.01.18.009	Konsultasi dan bantuan hukum	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan Hukum	64 orang	-	-				80 orang		
					53.859.863.942						

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Melakukan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Riau;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas aparturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang cita-citakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Riau yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
2. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
3. Penerapan E-Government;
4. Belum akuratnya data pegawai melalui penrapan Sistem Penilaian Kinerja secara berbasis eletronik;
5. Pemberlakukan single salary; dan
6. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ; Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualiatas pelayanan Internal SKDP.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manejerial;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui beasiswa tugas belajar ;
3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;

6. Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
7. Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja
8. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi.

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

Strategi 1 : Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manejerial

- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan fungsional;
- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- Melakukan seleksi terbuka bagi jabatan tinggi Provinsi Riau; dan
- Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar

- Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa

Strategi 3 : Meningkatkan kualitas kompetensi aparatus sipil negara melalui uji kompetensi

- Melakukan pemetaan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara;
- Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan;
- Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara

terbuka, transparan, dan objektivitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;

- Melakukan pelaksanaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Strategi 4 : Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara

- Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi melalui pemantau disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Melakukan tindakan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi; dan
- Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil Negara.

Strategi 5 : Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara

- Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
- Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum;
- Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku melalui Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara; dan

- Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya;

Strategi 6 : Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi.

- Melakukan penyusunan dokumen penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (right sizzing) dengan pemetaan (Mapping);
- Melakukan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional
- Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi PNS;
- Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis E-Kepegawaian dan satu pintu
- Meningkatkan profesional pelayanan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian untuk mewujudkan pelayanan prima
- Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
- Pengembangan Aplikasi Manajemen Kepegawaian berbasis elektronik
- Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil negara.
- Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, manajemen kepegawaian serta mengevaluasi kegiatan dan program yang dilaksanakan

Strategi 7 : Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja

- Penerapan proses kegiatan dan program yang terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Strategi 8 : Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi yang terakriditas

- Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen apartur sipil negara melalui sistem informasi berbasis E-Government perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;
- Membangun UPT Asement untuk pengembangan dan pelaksanaan asesment center provinsi Riau dengan fasilitas dan sarana yang sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan assessment;

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi kebutuhan;
2. Kedisiplinan pegawai yang masih rendah;
3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang belum optimal;
4. Belum Akuratnya Data Kepegawaian;dan
5. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.

Maka selanjutnya dalam proses kedepan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau dan Manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam menciptakan pemerintahan yang handal dan terpercaya.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

TABEL II.3. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.627.544.220	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.214.252.620	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan	3075 surat	23.517.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 12 bulan	3075 surat	23.517.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	1 Tahun	976.245.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	1 Tahun	976.245.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	20 unit	481.050.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	20 unit	481.050.000	
4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Terpeliharanya Kendaraan dan STNK Tahun Berjalan	10 unit mobil dan 4 unit motor	189.742.800	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Terpeliharanya Kendaraan dan STNK Tahun Berjalan	10 unit mobil dan 4 unit motor	189.402.800	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	24 Orang	692.574.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	24 Orang	692.574.000	
6	Penyediaan Alat tulis Kantor	Pekanbaru	Tersedianya Alat tulis Kantor pada kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	1621 Unit	99.879.600	Penyediaan Alat tulis Kantor	Pekanbaru	Tersedianya Alat tulis Kantor pada kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	1621 Unit	84.092.600	
7	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Pekanbaru	Tersedianya Barang cetakan dan pengadaan untuk 12 bulan	1 Tahun	100.500.000	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Pekanbaru	Tersedianya Barang cetakan dan pengadaan untuk 12 bulan	1 Tahun	100.500.000	
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan	1241 buah, 56 roll	74.985.220	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan	1241 buah, 56 roll	74.985.220	
9	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Pekanbaru	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	528 Exp/25 buku	75.250.000	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Pekanbaru	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	528 Exp/25 buku	69.000.000	
10	Penyediaan Makanan dan minuman	Pekanbaru	Tersedianya Makan minum rapat, Tamu dan kegiatan	2740 Ok	100.000.000	Penyediaan Makanan dan minuman	Pekanbaru	Tersedianya Makan minum rapat, Tamu dan kegiatan	2740 Ok	99.600.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pekanbaru	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	699.916.000	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pekanbaru	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	699.466.000	
12	Penyediaan Jasa keamanan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya Jasa keamanan kantor selama 112 bulan	23 Orang	648.820.000	Penyediaan Jasa keamanan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya Jasa keamanan kantor selama 112 bulan	23 Orang	648.820.000	
13	Pameran pembangunan (Riau Expo)	Pekanbaru	Terlaksananya Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	1 kegiatan	75.000.000	Pameran pembangunan (Riau Expo)	Pekanbaru	Terlaksananya Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	1 kegiatan	75.000.000	
14	Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	Meranti	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	1 Dokumen	390.064.600	Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	Meranti	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	1 Dokumen	-	

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				545.454.100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				545.454.100	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	3 unit	258.454.100	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	3 unit	258.454.100	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor kantor	161 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor kantor	161 Unit	70.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor	895 kali, 103 buah, 20 roll	217.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor	895 kali, 103 buah, 20 roll	217.000.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				374.838.700	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				505.958.200	
1	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Pekanbaru	Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur	138 Orang	62.240.000	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Pekanbaru	Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental aparatur	138 Orang	52.489.700	
2	Pelaksanaan sumpah/janji PNS	Pekanbaru	Terselenggaranya sumpah/janji PNS	300 Orang	55.479.700	Pelaksanaan sumpah/janji PNS	Pekanbaru	Terselenggaranya sumpah/janji PNS	300 Orang	26.616.200	
	Pemantauan disiplin PNS	Pekanbaru	Terlaksananya Pemantauan disiplin PNS	1 Dokumen	77.791.700	Pemantauan disiplin PNS	Pekanbaru	Terlaksananya Pemantauan disiplin PNS	1 Dokumen	73.291.700	
3	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Pekanbaru	Terselesainya penanganan kasus-kasus kepegawaian	60 Orang	111.166.600	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Pekanbaru	Terselesainya penanganan kasus-kasus kepegawaian	60 Orang	105.466.400	
5	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Pekanbaru	Terlaksananya konseling psikologi permasalahan ASN	50 Orang	68.160.700	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Pekanbaru	Terlaksananya konseling psikologi permasalahan ASN	50 Orang	66.165.300	
6	Konsultasi dan Bantuan Hukum		Terlaksananya Konsultasi dan Bantuan Hukum	21 Orang	189.858.900	Konsultasi dan Bantuan Hukum		Terlaksananya Konsultasi dan Bantuan Hukum	21 Orang	181.928.900	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				597.684.600	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				575.916.600	
1	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Terlaksananya pengiriman PNS fungsional umum/khusus PNS di Lingkungan Provinsi Riau	44 Orang	597.684.600	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Terlaksananya pengiriman PNS fungsional umum/khusus PNS di Lingkungan Provinsi Riau	44 Orang	575.916.600	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				131.560.500	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtikisar realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ihtikisar realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	43.488.500	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihtikisar realisasi Kinerja SKPD	Pekanbaru	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ihtikisar realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	-	
2	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Pekanbaru	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	2 Dokumen	42.350.000	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Pekanbaru	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	2 Dokumen	-	
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Pekanbaru	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan	1 Dokumen	36.000.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Pekanbaru	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan	1 Dokumen	-	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Pekanbaru	Terlaksananya laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	9.722.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Pekanbaru	Terlaksananya laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	-	
5						Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Kabupaten Meranti	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	1 Dokumen	-	

VI	Program Pendidikan Kedinasan				28.781.827.162	Program Pendidikan Kedinasan				14.063.105.800	
1	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Luar Daerah	Terlaksananya pemberian Beasiswa tugas belajar Luar Negeri	43 Orang	5.000.000.000	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Luar Daerah	Terlaksananya pemberian Beasiswa tugas belajar Luar Negeri	43 Orang	4.741.676.200	
2	Pendidikan dan Pelatihan Struktural badi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	Terkirimnya Pejabat Struktural menjadi peserta Diklat Pim TK. I	1 Orang	77.864.800	Pendidikan dan Pelatihan Struktural badi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	Terkirimnya Pejabat Struktural menjadi peserta Diklat Pim TK. I	1 Orang	71.170.100	
3	Pendidikan dan Pelatihan Struktural badi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	Terkirimnya Pejabat Struktural menjadi peserta Diklat Pim TK. I	6 Orang	683.501.162	Pendidikan dan Pelatihan Struktural badi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	Terkirimnya Pejabat Struktural menjadi peserta Diklat Pim TK. I	6 Orang	670.985.900	
4	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Pekanbaru	Terlaksananya Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	50 Orang	142.462.800	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Pekanbaru	Terlaksananya Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	50 Orang	-	
5	Penunjang pendidikan ikatan Dinas	Luar Daerah	Terlaksananya pendidikan ikatan Dinas	17 Orang	814.892.600	Penunjang pendidikan ikatan Dinas	Luar Daerah	Terlaksananya pendidikan ikatan Dinas	17 Orang	579.273.600	
6	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Luar Negeri	Terlaksananya pemberian Beasiswa tugas belajar Luar Negeri	6 Orang	8.000.000.000	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Luar Negeri	Terlaksananya pemberian Beasiswa tugas belajar Luar Negeri	6 Orang	8.000.000.000	
VII	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				501.304.600	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				494.649.000	
1	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	143 Orang	153.690.000	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	143 Orang	153.735.800	
2	Pelatihan dan Peningkatan kapasitas Assessor Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan kapasitas Assessor Provinsi Riau	25 Orang	208.200.500	Pelatihan dan Peningkatan kapasitas Assessor Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan kapasitas Assessor Provinsi Riau	25 Orang	201.499.100	
3	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Pekanbaru	Terselenggaranya Upacara HUT KORPRI	1 kegiatan	61.357.000	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Pekanbaru	Terselenggaranya Upacara HUT KORPRI	1 kegiatan	61.357.000	
4	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang meninggal	Pekanbaru	Terlaksananya Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang meninggal	20 Orang	78.057.100	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang meninggal	Pekanbaru	Terlaksananya Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang meninggal	20 Orang	78.057.100	
VIII	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				17.825.592.005	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				8.637.463.058	
1	Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Karya Satya	500 Orang	113.044.800	Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Karya Satya	500 Orang	113.044.800	
2	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	12 Kabuten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan Taspen PNS Se-Provinsi Riau	1 Dokumen	69.826.490	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	12 Kabuten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan Taspen PNS Se-Provinsi Riau	1 Dokumen	69.826.300	
3	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD	Pekanbaru	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD	10 Orang	100.000.000	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD	Pekanbaru	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD	10 Orang	100.000.000	
4	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	12 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	20 Orang	658.631.800	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	12 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti	20 Orang	645.699.800	

5	Monitoring IPDN	7 Regional dan 1 Kampus Pusat IPDN	Terlaksananya Monitoring IPDN di 8 regional kampus IPDN	1 Dokumen	232.851.900	Monitoring IPDN	7 Regional dan 1 Kampus Pusat IPDN	Terlaksananya Monitoring IPDN di 8 regional kampus IPDN	1 Dokumen	213.960.900
6	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS PProvinsi Riau	12 Kabuten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS PProvinsi Riau	1 Dokumen	92.674.000	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS PProvinsi Riau	12 Kabuten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS PProvinsi Riau	1 Dokumen	92.674.000
7	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	12 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	1 Dokumen	114.912.600	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	12 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	1 Dokumen	114.912.600
8	Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	1 Dokumen	143.975.900	Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan SIMPEG di Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	1 Dokumen	-
9	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara	250 Orang	967.719.900	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara	250 Orang	877.624.700
10	Pengelolaan Ujian dinas, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	380 Orang	251.913.100	Pengelolaan Ujian dinas, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	380 Orang	192.433.000
11	Pegembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)		Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	7000 Dokumen elektronik	241.112.900	Pegembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)		Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	7000 Dokumen elektronik	224.942.700
12	Perlombaan dalam rangka HUT KORPRI		Terlaksananya Perlombaan dalam rangka HUT KORPRI	1 kegiatan, 8 cabang olahraga	113.385.200	Perlombaan dalam rangka HUT KORPRI		Terlaksananya Perlombaan dalam rangka HUT KORPRI	1 kegiatan, 8 cabang olahraga	104.527.300
13	MTQ Nasional KORPRI		Terlaksananya penyelenggaraan MTQ Nasional KORPRI	18 peserta	389.499.100	MTQ Nasional KORPRI		Terlaksananya penyelenggaraan MTQ Nasional KORPRI	18 peserta	702.789.300
14	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan manajemen kepegawaian dengan BKD 12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	166.787.500	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan manajemen kepegawaian dengan BKD 12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	166.787.500
15	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau		Tersedianya E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	1 aplikasi	4.270.224.157	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau		Tersedianya E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	1 aplikasi	4.221.199.958
16	Pemetaan jabatan Administrasi Provinsi Riau		Terlaksananya Pemetaan jabatan Administrasi Provinsi Riau	960 Orang	386.182.800	Pemetaan jabatan Administrasi Provinsi Riau		Terlaksananya Pemetaan jabatan Administrasi Provinsi Riau	960 Orang	364.580.800
17	Penyusunan Standar kompetensi manajerial Provinsi Riau		Terlaksananya Penyusunan Standar kompetensi manajerial Provinsi Riau	1 Dokumen	173.480.900	Penyusunan Standar kompetensi manajerial Provinsi Riau		Terlaksananya Penyusunan Standar kompetensi manajerial Provinsi Riau	1 Dokumen	164.380.900
18	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kab/Kota Se-Provinsi Riau		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi	1 Dokumen	96.630.500	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kab/Kota Se-Provinsi Riau		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi	1 Dokumen	88.674.500
19	Monitoring dan Evaluasi kenaikan pangkat PNS Provinsi Riau		Terlaksananya Monitoring dan pendampingan penyusunan kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Provinsi Riau	1 Dokumen	179.704.000	Monitoring dan Evaluasi kenaikan pangkat PNS Provinsi Riau		Terlaksananya Monitoring dan pendampingan penyusunan kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Provinsi Riau	1 Dokumen	179.404.000

20	MTQ KORPRI Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan MTQ Provinsi Riau	1 Kegiatan	425.571.400	MTQ KORPRI Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan MTQ Provinsi Riau	1 Kegiatan	-	
IX	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara				4.507.922.196	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara				2.189.576.898	
1	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	3000 Orang	241.926.100	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	3000 Orang	241.926.100	
2	Pengelolaan Pensiun PNS	Pekanbaru	Terlaksananya Pensiun Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	400 Orang	167.637.800	Pengelolaan Pensiun PNS	Pekanbaru	Terlaksananya Pensiun Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	400 Orang	136.415.900	
3	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	4000 Orang	250.346.000	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	4000 Orang	248.746.000	
4	Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau		Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu	50 Orang	88.875.500	Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKD Provinsi Riau		Terlaksananya Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu	50 Orang	63.974.100	
5	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	Terwujudnya Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	2000 Orang	107.622.900	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	Terwujudnya Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	2000 Orang	107.622.900	
6	Pengelolaan dan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik		Tersusunnya standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	103.794.000	Pengelolaan dan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik		Tersusunnya standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik BKD Provinsi Riau	1 Dokumen	103.214.000	
7	Pengelolaan administrasi pegawai		Terlaksananya penyelesaian administrasi pegawai	300 Orang	177.273.600	Pengelolaan administrasi pegawai		Terlaksananya penyelesaian administrasi pegawai	300 Orang	159.924.500	
8	Pengelolaan Kartu pegawai elektronik		Terkelolanya KPE Provinsi Riau dengan baik	160 Kpe	124.130.000	Pengelolaan Kartu pegawai elektronik		Terkelolanya KPE Provinsi Riau dengan baik	160 Kpe	-	
9	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau		Tersusunnya Formasi PNS Provinsi Riau	1 Dokumen	278.897.600	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau		Tersusunnya Formasi PNS Provinsi Riau	1 Dokumen	226.836.600	
10	Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	1 Tahun	115.000.000	Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	1 Tahun	114.963.000	
11	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Pimpinan tinggi prtama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau		Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Pimpinan tinggi prtama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau	100 Orang	86.069.000	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Pimpinan tinggi prtama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau		Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Pimpinan tinggi prtama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau	100 Orang	209.331.000	
12	Penyelenggaraan pengambilan sumpah dahn pelantikan jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Penyelenggaraan pengambilan sumpah dahn pelantikan jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Provinsi Riau	100 Orang	19.569.900	Penyelenggaraan pengambilan sumpah dahn pelantikan jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Penyelenggaraan pengambilan sumpah dahn pelantikan jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Provinsi Riau	100 Orang	19.569.900	
13	Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	1 Tahun	51.643.898	Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	1 Tahun	51.643.898	
14	Pembangunan Sistem aplikasi penatausahaan BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Sistem aplikasi penatausahaan BKD Provinsi Riau	1 aplikasi	85.000.000	Pembangunan Sistem aplikasi penatausahaan BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Sistem aplikasi penatausahaan BKD Provinsi Riau	1 aplikasi	85.000.000	

15	Penyelenggaraan verifikasi usulan kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/kota Se-Provinsi Riau	pekanbaru	Terlaksananya Penyelenggaraan verifikasi usulan kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/kota Se-Provinsi Riau	4000 Orang	375.066.000	Penyelenggaraan verifikasi usulan kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/kota Se-Provinsi Riau	pekanbaru	Terlaksananya Penyelenggaraan verifikasi usulan kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/kota Se-Provinsi Riau	4000 Orang	375.016.000	
16	Pengelolaan Administrasi penggunaan gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi penggunaan gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	50 Orang	45.493.000	Pengelolaan Administrasi penggunaan gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi penggunaan gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	50 Orang	45.393.000	
X	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur				281.363.400	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur				187.390.500	
	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Pekanbaru	Terselenggaranya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	80 Orang	77.296.000	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Pekanbaru	Terselenggaranya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	80 Orang	75.923.200	
	Penyelenggaraan Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	16800 Orang	204.067.400	Penyelenggaraan Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Pekanbaru	Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	16800 Orang	111.467.300	
JUMLAH					45.824.948.055					31.413.766.776	

II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

BAB III

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019 dan direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019, mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019. Secara sfesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan

Disisi lainya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019 yang telah direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Dalam hal ini program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019 yang telah direvisi menjadi Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/kelembagaan

adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki *visi* “**Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani**” dan *misi* “**Penggerak Utama Reformasi Birokrasi**”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***“menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi”*** untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil;
- b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;

- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi “Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Yang Profesional dan Berkesinambungan” yang dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu:

- a. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga kediklatan;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. Melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standar pelayanan;
- c. Mengembangkan sistem rekrutmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepegawaian mencakup proses rekrutment (pengadaan) PNS dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
- e. Optimalisasi sistem kepegawaian berbasis informasi teknologi Sinkronisasi kebijakan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
- g. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
- h. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;
- i. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standart pelayanan;
- j. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2018

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selaku institusi yang dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional, untuk itu disusun Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 yaitu “***Terwujudnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang Profesional, Akuntabel dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2025 .***

Adapun misi yang ingin dijalankan berdasarkan visi diatas adalah :

1. Meningkatkan Mutu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau Pusat Pembinaan Aparatur;
2. Mengembangkan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai Pusat Pengembangan Aparatur dengan Tata Pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*);

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi pada visi organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara; dan

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Internal SKDP.

III.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018 sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
3.00.					5.841.581.520				8.880.169.608
3.00.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100 Persen	4.214.252.620				5.657.727.288
3.00.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 12 bln	Pekanbaru	3075 Surat	23.517.000	-		3075 Surat	23.517.000
3.00.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bln	Pekanbaru	1 Tahun	976.245.000	-		1 Tahun	973.845.000
3.00.3.00.03.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	20 Unit	481.050.000	-		150 Unit	1.301.500.000
3.00.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dan STNK Tahun Berjalan	Pekanbaru	10 Unit Mobil dan 4 Unit Motor	189.402.800	-		10 Unit Mobil dan 4 Unit Motor	190.691.514
3.00.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan untuk pelaksanaan kebersihan kantor	Pekanbaru	24 Orang	692.574.000	-		27 Orang	703.500.000
3.00.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis atau item alat tulis kantor pada kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	Pekanbaru	37 Item	84.092.600	-		37 Item	100.500.000
3.00.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedianya jenis atau item barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bln	Pekanbaru	26 Item	100.500.000	-		26 Item	100.500.000
3.00.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	1241 buah 56 roll	74.985.220	-		2100 buah 70 roll	92.960.992
3.00.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia	Pekanbaru	528 Exp	69.000.000	-		1488 Exp/140 Buku	159.951.200
3.00.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makan Minum Rapat Tamu dan Kegiatan	Pekanbaru	4620 Ok	99.600.000	-		4620 Ok	202.000.000
3.00.3.00.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten dan Luar Daerah	12 Bulan	699.466.000	-		12 Bulan	852.781.582
3.00.3.00.03.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa keamanan kantor selama 12 bln	Pekanbaru	23 Orang	648.820.000	-		23 Orang	805.980.000
3.00.3.00.03.01.01.116.	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	Pekanbaru	1 Kegiatan	75.000.000	-		1 Kegiatan	150.000.000
3.00.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100 Persen	545.454.100				1.508.580.000
3.00.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Pekanbaru	3 Unit	258.454.100	-		3 Unit	1.275.000.000
3.00.3.00.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pekanbaru	161 Unit	70.000.000	-		161 Unit	7.000.000

3.00.3.00.03.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	Pekanbaru	895 kali 103 buah 20 roll	217.000.000	-	895 kali 103 buah 20 roll	226.580.000
3.00.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		100 Persen	505.958.200			1.101.862.320
3.00.3.00.03.01.03.006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental	Pekanbaru	135 Orang	52.489.700	-	135 Orang	62.240.000
3.00.3.00.03.01.03.012.	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah PNS yang diambil sumpah janjinya	Pekanbaru	300 Orang	26.616.200	-	350 Orang	88.082.320
3.00.3.00.03.01.03.013.	Pemantauan disiplin PNS	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Dokumen	73.291.700	-	1 Dokumen	180.000.000
3.00.3.00.03.01.03.014.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian	Pekanbaru	60 Kasus	105.466.400	-	60 Kasus	185.925.000
3.00.3.00.03.01.03.016.	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti konseling psikologi	Pekanbaru	48 Orang	66.165.300	-	150 Oarng	285.615.000
3.00.03.3.00.03.01.03.037.	Konsultasi dan Bantuan Hukum	Jumlah ASN yang diberikan Konsultasi dan Bantuan Hukum	Provinsi dan Kabupaten/kota	21 Orang	181.928.900	-	40 Orang	300.000.000
3.00.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara		100 Persen	575.916.600			612.000.000
3.00.3.00.03.01.05.026.	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS Pemrov Riau yang mengikuti diklat fungsional tertentu	Luar Daerah	44 Orang	575.916.600	-	44 Orang	612.000.000
3.00.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				25.572.185.256			30.882.408.040
3.00.03.3.00.03.01.15.	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan		50 Orang	14.063.105.800			18.762.259.554
3.00.03.3.00.03.01.15.008	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS Pemrov Riau yang mendapatkan beasiswa tugas belajar luar negeri	Luar Daerah	41 Orang	4.741.676.200	-	48 Orang	6.500.000.000
3.00.03.3.00.03.01.15.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pejabat Eselon I yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I	Luar Daerah	1 Orang	71.170.100	-	1 Orang	86.670.020
3.00.03.3.00.03.01.15.010	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pejabat Eselon II yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan Tk II	Luar Daerah	6 Orang	670.985.900	-	6 Orang	815.589.534
3.00.03.3.00.03.01.15.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Praja IPDN dan STTD mengikuti pendidikan kedinasan	Luar Daerah	17 Orang	579.273.600	-	32 Orang	1.360.000.000
3.00.03.3.00.03.01.15.017	Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri	Terlaksananya Pemberian beasiswa tugas belajar luar negeri	Luar Negeri	6 Orang	8.000.000.000	-	8 Orang	10.000.000.000
3.00.03.3.00.03.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara		100 Persen	494.649.000			867.298.434
3.00.03.3.00.03.01.16.030.	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Jumlah anggota Dewan Pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi	Pekanbaru	143 Orang	153.735.800	-	120 Orang	136.463.434
3.00.03.3.00.03.01.16.061	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	Pekanbaru	25 Orang	201.499.100	-	30 Orang	504.108.000
3.00.03.3.00.03.01.16.072.	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	Pekanbaru	1 Kegiatan	61.357.000	-	1 Kegiatan	106.727.000
3.00.03.3.00.03.01.16.073	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Anggota KORPRI Yang Meninggal	Pekanbaru	20 Orang	78.057.100	-	20 Orang	120.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional		100 Persen	8.637.463.058			7.784.199.552
3.00.03.3.00.03.01.17.031	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satya Lencana	Pekanbaru	500 Orang	113.044.800	-	500 Orang	150.000.000

3.00.03.3.00.03.01.17.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetatum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Jumlah dokumen tapetatum dan taspen PNS se Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	69.826.300	-	1 Dokumen	125.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.047	Pendidikan Pelatihan Kursus dan Bimtek Pegawai BKD	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan pelatihan kursus dan bimtek	Pekanbaru	7 orang	100.000.000	-	30 Orang	218.587.500
3.00.03.3.00.03.01.17.056.	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional peneliti	Jumlah PNS Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kemampuan teknis tenaga Fungsional Peneliti	Luar Daerah	20 Orang	645.699.800	-	20 Orang	770.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.057	Monitoring IPDN	Jumlah dokumen pelaksanaan Monitoring IPDN di 8 regional kampus IPDN	8 Kampus Regional 1 Kampus Pusat	1 Dokumen	213.960.900	-	1 Dokumen	242.564.000
3.00.03.3.00.03.01.17.060.	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau di 12 Kabupaten/kota	Julu Kuantan Singingi Indragiri	1 Dokumen	92.674.000	-	1 Dokumen	150.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.066	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten / Kota	12 Kabupaten/kota	1 Dokumen	114.912.600	-	1 Dokumen	150.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	250 Orang	877.624.700	-	250 Orang	1.119.377.909
3.00.03.3.00.03.01.17.070	Pengelolaan Ujian dinas dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pekanbaru dan Kabupaten	380 Orang	192.433.000	-	380 Orang	413.150.000
3.00.03.3.00.03.01.17.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	Pekanbaru	7000 Dokumen elektronik	224.942.700	-	7000 Dokumen elektronik	308.400.000
3.00.03.3.00.03.01.17.098	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Terlaksananya Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Pekanbaru	1 Kegiatan 8 Cabang olahraga	104.527.300	-	1 Kegiatan 8 Cabang olahraga	182.407.500
3.00.03.3.00.03.01.17.100.	MTQ Nasional KORPRI	MTQ korpri provinsi dan MTQ nasional korpri	Luar daerah	120 orang MTQ provinsi/10 orang MTQ nasional	702.789.300	-	120 orang provinsi/10 orang	800.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.109	Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan Manajemen Kepegawaian dengan BKD 12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/kota	1 Dokumen	166.787.500	-	1 Dokumen	200.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.114.	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Tersedianya e-government Manajemen Kepegawaian Provisnis Riau	Pekanbaru	1 Aplikasi	4.221.199.958	-	1 Aplikasi	2.000.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.116	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Administrasi Provinsi Riau yang terpetakan berdasarkan kompetensinya	Pekanbaru	960 Orang	364.580.800	-	500 Orang	254.712.643
3.00.03.3.00.03.01.17.117.	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Dokumen	164.380.900	-	1 Dokumen	250.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.120	Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota se Provinsi Riau	Kabupaten/kota	1 Dokumen	88.674.500	-	1 Dokumen	150.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.127.	Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau	Terlaksananya Monitoring dan Pemdampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Provinsi Riau	12 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	179.404.000	-	1 Dokumen	300.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan		80 Persen	2.189.576.898			3.388.650.500

3.00.03.3.00.03.01.18.001	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah PNS Pindah Tugas	u dan Kabupaten Kota se Pro	3000 Orang	241.926.100	-	4000 Orang	400.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.002.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Riau yang Pensiun	Pekanbaru	400 Orang	136.415.900	-	500 Orang	410.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.006	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Jumlah PNS Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	Pekanbaru	4 000 Orang	248.746.000	-	6 000 Orang	500.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah usulan SK jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau	Pekanbaru	2000 Orang	107.622.900	-	3000 Orang	200.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.009	Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Dokumen	103.214.000	-	1 Dokumen	110.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah PNS Provinsi Riau yang di data melakukan administrasi kepegawaian	Pekanbaru	300 Orang	159.924.500	-	400 Orang	250.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.013	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen penyusunan formasi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru dan Kabupaten	1 Dokumen	226.836.600	-	1 Dokumen	393.650.500
3.00.03.3.00.03.01.18.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah usulan SK PNS Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	500 Orang	209.331.000	-	1000 Orang	250.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.020	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau	Jumlah PNS Jabatan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau yang dilantik dan di sumpah	Pekanbaru	500 Orang	19.569.900	-	1000 Orang	25.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.023.	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau yang diusulkan angka kredit	Pekanbaru	50 Orang	63.974.100	-	50 Orang	120.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.025	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat PNS diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau	Pekanbaru	4000 Orang	375.016.000	-	4000 Orang	400.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.026.	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah usulan penyesuaian Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru dan Jakarta	50 Orang	45.393.000	-	50 Orang	50.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.027	Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau	Jmlah liputan kegiatan BKD setiap bulan	Pekanbaru	12 Bulan	114.963.000	-	12 bulan	115.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.028.	Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau	Jumlah berita yang dikelola melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	Pekanbaru	12 bulan	51.643.898	-	12 Bulan	75.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.029	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan yang dikembangkan	Pekanbaru	1 Aplikasi	85.000.000	-	1 aplikasi	90.000.000
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti		2 Persen	187.390.500			80.000.000
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah PNS Memasuki Masa Pensiun yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta	Pekanbaru	80 Orang	75.923.200	-	80 Orang	80.000.000
3.00.03.3.00.03.01.19.006	Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah SKP PNS yang dilakukan penilaian kerjanya	Pekanbaru	16800 orang	111.467.300	-	-	-
TOTAL					31.413.766.776			39.762.577.648



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2018 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

